

Implementation Of The Micro Business Clinic (KUM) Program In Sidoarjo Regency

[Implementasi Program Klinik Usaha Mikro (KUM) Di Kabupaten Sidoarjo]

Rury Hilda Pandu Winata¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to describe and analyze the implementation of the Micro Business Clinic (KUM) Program in Sidoarjo Regency using a descriptive qualitative research method. The program is designed to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by providing consultations, guidance, and financial literacy training. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, with informants selected through purposive sampling. The informants consist of Customer Service staff at the Micro Business Cooperative Clinic and its customers, primarily MSME actors who seek business development assistance. The data analysis follows the Miles & Huberman (1994) model, which includes four stages: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings highlight four key indicators of program implementation. (1) Communication: The Micro Business Cooperative Clinic actively conducts socialization, workshops, and seminars to educate MSME actors. (2) Resources: The clinic operates with only two human resources, faces budget constraints, and requires additional funding to optimize services. (3) Disposition: The implementation encounters obstacles due to occasional slow performance, impacting service effectiveness. (4) Bureaucratic Structure: The program follows an efficient Standard Operating Procedure (SOP), making it easier for MSME actors to register and access services. Despite its efforts to enhance service quality, the Micro Business Cooperative Clinic continues to face challenges, particularly in terms of human resources and system performance. Addressing these issues is essential to maximize its impact on MSME development in Sidoarjo Regency.*

Keywords – Implementation Program, The Micro Business Clinic Program

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Klinik Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Program ini dirancang untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui konsultasi, pendampingan, dan pelatihan literasi keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri dari staf Customer Service Klinik Koperasi Usaha Mikro dan para pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan pengembangan usaha. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman (1994) dengan empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan empat indikator utama pelaksanaan program, yaitu komunikasi (sosialisasi, lokakarya, dan seminar untuk edukasi UMKM), sumber daya (hanya dua SDM, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan pendanaan tambahan), disposisi (hambatan berupa kinerja yang kadang lambat sehingga memengaruhi efektivitas layanan), serta struktur birokrasi (penerapan SOP yang efisien memudahkan pendaftaran dan akses layanan UMKM). Meskipun upaya peningkatan kualitas layanan telah dilakukan, Klinik Koperasi Usaha Mikro masih menghadapi tantangan, terutama terkait sumber daya manusia dan kinerja sistem, yang perlu segera diatasi agar dampaknya terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo dapat dimaksimalkan.*

Kata Kunci: Implementasi Program; Klinik Koperasi Usaha Mikro (KUM)

I. PENDAHULUAN

Pada pesatnya perkembangan dunia, Indonesia sebagai negara berkembang mengarahkan pengembangan dan peningkatan ekonomi pada kualitas unggul, yang secara langsung berdampak pada berbagai usaha di Indonesia. Seiring waktu, berbagai jenis usaha mulai berkembang di Indonesia, mencakup usaha skala kecil hingga besar. UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memiliki peranan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dengan kontribusi yang signifikan dalam berbagai sektor. Meskipun banyak perusahaan besar yang gulung tikar pada krisis ekonomi 1998, sektor UMKM tetap bertahan, membuktikan peran pentingnya dalam perekonomian Indonesia, UMKM tetap bertahan dan menunjukkan ketangguhannya di tengah krisis tersebut [1]. Perkembangan

pesat perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran berbagai jenis usaha, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Seiring peningkatan tersebut, pertumbuhan UMKM di Indonesia juga menunjukkan peningkatan setiap tahun [2]. Untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan mereka, manusia harus bersaing dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan bekerja [3]. Seiring kemajuan zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berperan krusial baik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pendapatan nasional. Sektor yang mampu berkembang secara konsisten turut berperan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, salah satunya yakni sektor UMKM [4]. Menjadi salah satu bagian penting dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM telah menjadi pilihan utama bagi banyak individu untuk memperoleh pemasukan dan mengurangi angka pengangguran [5]. Kemajuan teknologi yang begitu cepat menyebabkan munculnya berbagai media dan inovasi baru yang berakibat meningkatkan daya konsumtif masyarakat Indonesia. Kemajuan zaman yang semakin pesat menuntut manusia untuk terus maju agar tetap kompetitif, terutama di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi yang pesat memberikan peluang bagi para pelaku bisnis untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas [6]. Sejalan dengan perkembangan bisnis yang terus mengalami perubahan saat ini, di mana persaingan dalam pemasaran produk dan ekspansi bisnis terjadi setiap saat. Oleh sebab itu, dibutuhkan layanan-layanan atau program-program dari pemerintah guna untuk meningkatkan UMKM dan memberi inovasi kepada para UMKM.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 1 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendefinisikan usaha mikro termasuk dalam kategori usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau usaha milik pribadi, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Usaha kecil merujuk pada jenis usaha yang dioperasikan secara independen oleh individu atau badan usaha, tanpa keterikatan pada perusahaan lain, baik sebagai anak perusahaan maupun cabang, dan tidak dimiliki atau dikelola oleh usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sementara itu, usaha menengah merupakan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau badan usaha, tanpa keterkaitan dengan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain yang dimiliki atau dikuasai oleh usaha kecil atau besar. Ketentuan mengenai jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya diatur dalam Undang-Undang ini. Keberhasilan usaha bergantung pada empat komponen utama: peluang dari perkembangan ekonomi, sosiologi yang mencakup nilai sosial dan budaya, psikologi yang membentuk motivasi berwirausaha, serta perilaku yang mencakup kepemimpinan, pemasaran, pengambilan keputusan, dan inovasi [7]. UKM termasuk kategori bisnis yang dikelola oleh individu atau entitas usaha perseorangan dengan syarat-syarat tertentu, serta memiliki pengaruh besar dalam memajukan perekonomian Indonesia, misalnya memberikan pelayanan ekonomi yang berkualitas kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dapat didorong secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Eentitas ekonomi yang mandiri dan produktif, dijalankan oleh pihak pribadi atau entitas usaha, dan tidak berafiliasi dengan jaringan bisnis yang lebih besar, baik dalam bentuk cabang maupun anak perusahaan masuk ke dalam kriteria undang-undang ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang, seperti pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 mengatur tentang posisi, organisasi, tugas, fungsi, dan sistem kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/265/404.1.1.3/ Tahun 2017 menetapkan Lembaga Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki andil yang besar. Dilakukannya pemberdayaan UMKM bertujuan untuk memperkuat usaha kecil dengan meningkatkan kapasitasnya, agar dapat mandiri dan berkembang menjadi usaha menengah yang lebih sukses, sekaligus memperbesar kontribusi industri kecil dalam pembuatan produk nasional. Disisi lain, seorang wirausahawan atau entrepreneur merupakan individu yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif serta mampu mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya agar menjadi unggul [8]. Sebagai pilar penting dalam perekonomian global, UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk di Indonesia. Memperkuat sektor UMKM dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat [9]. Bagi masyarakat dengan pendapatan kurang stabil, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi yang mendukung mereka. Melalui penyediaan berbagai jenis pekerjaan dan peluang usaha, UMKM membantu meningkatkan taraf hidup keluarga-keluarga tersebut. Lebih jauh lagi, Dengan kontribusinya dalam memperluas peluang kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, sektor ini berdampak langsung dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [10]. Produk-produk berkualitas tinggi yang dihasilkan UMKM mampu menarik pasar internasional, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara melalui ekspor. UMKM dapat mendukung diversifikasi sumber pendapatan negara serta meningkatkan arus masuk devisa dengan memasarkan produk ke pasar internasional. Oleh karena itu perkembangan UMKM sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian di Indonesia.

Sidoarjo yang terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu kabupaten dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu pusat berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM), bahkan tercatat sebagai daerah dengan jumlah UMKM terbanyak di Indonesia, yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dan nasional [11]. Meskipun sektor UMKM di Kabupaten Sidoarjo terus berkembang pesat, perekonomian yang berjalan juga bergantung pada sektor industri dan perdagangan lainnya, dengan berbagai jenis usaha yang mendorong pertumbuhan dan pengembangannya [12]. Demi menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan positif, pengembangan sangat dibutuhkan agar sektor UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional. Sektor UMKM, seperti tas kulit dan sandal buatan tangan, aksesoris, busana, serta kuliner dan minuman, banyak diminati oleh pelaku usaha. Dengan begitu pelaku usaha dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tren terkini agar dapat memanfaatkannya sebagai strategi inovasi dalam menjalankan usaha [13]. Dukungan berupa peluang usaha, perlindungan, serta pengembangan menyeluruh penting untuk memperkuat peran, posisi, dan potensi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor usaha yang dilakukan dengan kapabilitas kuat akan membawa hasil yang bermanfaat bagi sektor UMKM di Sidoarjo. Sebagai kota dengan banyak UMKM, tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan UMKM melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Dalam mengoptimalkan potensi terhadap berkembangnya serta kemajuan UMKM yang ada, Pemerintah Sidoarjo melakukan serta menyediakan pembinaan pada pelaku usaha khususnya usaha mikro dengan fasilitas pendampingan usaha melalui bantuan ahli dalam bisnis serta sarana prasarana yang optimal, sehingga terjadi peningkatan kualitas dalam pengetahuan mengenai bisnis. Layanan gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan, tanpa memandang skala usaha, ras, maupun tingkat ekonomi. Menghadapi dinamika ekonomi yang tidak terprediksi, inisiatif dan skema yang telah dirancang diharapkan dapat menjadi dorongan baru bagi pelaku bisnis mikro tahap awal untuk setara dengan jangkauan yang luas lagi. Jadi, sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Kabupaten Sidoarjo, pemerintah kini menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bisnis gratis melalui Klinik KUM yakni Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Klinik KUM tidak melayani seluruh Kabupaten, namun di Sidoarjo, pelaku UMKM yang terdaftar serta menjadi bagian dari Klinik Usaha Mikro berkesempatan untuk menerima bantuan dan pendampingan untuk pengembangan usaha dan berhak mengakses layanan klinik. Klinik KUM sebagai lini depan untuk mendampingi, terbuka bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai binaan. Klinik KUM Kabupaten Sidoarjo sendiri telah berdiri sejak tahun 2017. Diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Klinik KUM adalah lembaga yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan fokus utama pada membantu koperasi serta pelaku usaha mikro ketika mengalami hambatan bisnis di Kabupaten Sidoarjo. Berbagai layanan publik yang berkaitan dengan dunia bisnis disediakan oleh lembaga ini, meliputi konsultasi perkoperasian, informasi bisnis UMKM, akses pembiayaan, dan pemasaran. Banyaknya pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk merancang program pembinaan dan konsultasi yang bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha. Klinik Koperasi dan Usaha Mikro memberikan layanan pembinaan kepada pelaku usaha koperasi dan usaha mikro. Bantuan yang diberikan memungkinkan usaha mikro untuk naik kelas, dari kecil ke menengah, hingga mencapai skala yang lebih besar. Seperti klinik kesehatan yang memiliki dokter untuk mengobati pasien, klinik KUM dilengkapi dengan *business advisor*. Bedanya, bukan menyembuhkan penyakit, tetapi memberikan solusi bagi pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya [14].

Dengan segala keterbatasan anggaran, program ini tetap mampu menjangkau UMKM dan memperluas jumlah pelaku usaha binaan yang mendapatkan pelatihan. Layanan terbaru yang diberikan oleh Klinik Usaha Mikro Di Kabupaten Sidoarjo ini yaitu penerbitan surat keterangan usaha mikro, surat keterangan pengajuan Kredit Usaha Rakyat Daerah KURDA, surat rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu, fasilitas penerbitan NIB usaha mikro, fasilitas sertifikasi halal, pengajuan surat keterangan pengurusan dan pengawas koperasi, serta layanan konsultasi koperasi. Adapun program-program yang diusung oleh Klinik Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo ini yaitu salah satu program utama yang dijalankan secara rutin adalah Program Sedekah Ilmu, Upaya tersebut merupakan inisiatif bagi pelaku usaha mikro yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan dukungan fasilitator, serta bekerja sama dengan perusahaan atau mitra bisnis. Melalui program sedekah ilmu ini, pelaku usaha dapat mempelajari berbagai aspek digital marketing dalam bisnis dan UMKM melalui fasilitator yang telah disediakan serta pelaku usaha yang hadir para program sedekah ilmu ini juga mendapatkan reward berupa goody bag atau souvenir yang telah disediakan dari perusahaan tersebut dan diperuntukan untuk para mitra pelaku usaha, tetapi program sedekah ilmu saat ini tidak bisa berjalan dengan optimal dikarenakan keterbatasan anggaran atau dana. Program selanjutnya yang ada pada Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu program warung rakyat renovasi, program inkubasi bisnis, dan program pengajuan KURDa melalui bank Delta Arta. Semua program serta layanan yang diberikan oleh Klinik Koperasi Dan Usaha Mikro ini dapat diakses dan diikuti secara gratis. Berikut ini adalah data jumlah pelaku usaha Klinik KUM pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021-2024:

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha Klinik Koperasi dan Usafasilha Mikro Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha
1.	2021	900 Pelaku Usaha
2.	2022	800 Pelaku Usaha
3.	2023	690 Pelaku Usaha

Sumber: Diolah Penulis Dari Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025).

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah pelaku usaha yang ada pada Klinik Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah banyak mengalami penurunan yang signifikan. Oada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 100 pelaku usaha, pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan jumlah pelaku usaha yaitu sebanyak 110 pelaku usaha. Penurunan pada jumlah pelaku usaha diakibatkan kurangnya dana atau anggaran yang disediakan oleh pemerintah sehingga sosialisasi tidak berjalan dengan optimal, program tersebut masih belum diketahui oleh banyak masyarakat, yang mencerminkan bahwa sosialisasi terkait perogram KUM kepada masyarakat sangatlah penting untuk membina masyarakat agar menjadi UMKM yang berkembang, disamping itu klinik KUM menyediakan layanan tanpa dipungut biaya apapun gratis yang tentu dapat memudahkan masyarakat mengikuti program-program atau layanan yang telah disediakan pada Klinik Koperasi Dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi dari pemerintah sehingga jumlah pelaku usaha di Klinik KUM menurun dari tahun ke tahun.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mariyati Endah, (2019) berjudul “Implementasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Masyarakat Di Kecamatan Tuminting Kota Manado”. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi dan situasi yang ada dalam masyarakat, dengan fokus pada objek penelitian berupa masyarakat itu sendiri. Penelitian bertujuan memahami fenomena yang dialami masyarakat sebagai subjek penelitian. Fokus utama penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dengan merujuk pada teori George Edward III yang mencakup empat indikator utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha kecil dapat dianalisis melalui empat aspek tersebut. Dalam hal komunikasi, penelitian menemukan bahwa pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM kepada masyarakat belum berjalan efektif. Banyak pelaku usaha kecil yang tidak mendapatkan informasi atau kesempatan mengikuti program tersebut. Terkait dengan sumber daya, wawancara menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia belum optimal. Banyak pelaku usaha kecil menghadapi kendala dalam keterampilan teknis, pengelolaan usaha, dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK). Selain itu, keterbatasan modal usaha juga menjadi faktor penghambat pemberdayaan usaha kecil, karena sumber daya finansial yang tersedia masih sangat terbatas. Pada disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, misalnya karakteristik dan perilaku pihak yang bertanggung jawab. Terakhir, struktur birokrasi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM memengaruhi jalannya proses kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hambatan dalam struktur birokrasi yang memperlambat proses implementasi kebijakan. Secara keseluruhan, penelitian mengidentifikasi berbagai tantangan, yang perlu diperbaiki melalui peningkatan komunikasi, pemenuhan sumber daya, serta peningkatan disposisi dan efisiensi dalam struktur birokrasi [15].

Kedua, penelitan terdahulu yang dilakukan oleh Fahrezi, (2022) berjudul “ Implementasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat”. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang telah berupaya memajukan UMKM di daerahnya. Penelitian ini memanfaatkan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi UMKM. Sebanyak 7 informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling terdiri dari pejabat Dinas Koperasi dan UKM serta pelaku UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang diterapkan sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan UMKM, implementasinya belum sepenuhnya menyentuh seluruh pelaku UMKM. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran, yang mengakibatkan hanya sebagian UMKM yang mendapatkan bantuan pengembangan, dengan fokus pada UMKM yang memiliki produk tertentu. Di sisi lain, lingkungan implementasi kebijakan sudah cukup baik, dengan berbagai upaya yang dilakukan, seperti pelatihan, pengadaan alat produksi, dan pemberian surat izin usaha. Namun, implementasi kebijakan belum merata dan belum mampu menjangkau semua pelaku UMKM di Kabupaten Karawang [16].

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arniati AS, (2019) berjudul “ Implementasi Program Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan UMKM dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Maros. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian

fenomenologi. Data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder, dengan tujuh informan yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara guna memahami secara lebih rinci pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di daerah tersebut, sementara analisis data dilakukan dengan cara membandingkan pendapat antar informan yang diberi pertanyaan serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Maros telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun beberapa bidang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kebijakan yang diterapkan oleh Diskoperindag, termasuk Standar dan Ukuran Kebijakan, sudah cukup memadai, namun diperlukan penguatan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan UMKM, di mana masyarakat didorong untuk mengurus izin usaha dan menerima bantuan dari pemerintah yang memotivasi pelaku usaha untuk aktif dalam membayar pajak usaha. Namun, dari sisi sumber daya manusia, masih ada kekurangan dalam hal jumlah yang tersedia. Agen pelaksana program pemberdayaan UMKM menunjukkan karakteristik yang dianggap sukses, dengan sistem birokrasi yang berjalan sesuai dengan prosedur operasional yang telah disusun. Ini menjadi faktor utama dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dari segi lingkungan sosial, kegiatan usaha yang dijalankan di daerah tertentu harus sesuai dengan norma dan adat setempat. Dari aspek ekonomi, program lebih fokus pada peningkatan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. Sementara itu, dalam ranah politik, kebijakan yang dikeluarkan harus sejalan dengan tujuan pemberdayaan pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha [17].

Berdasarkan observasi lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Klinik Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program ini. Hanya ada dua SDM yang mengelola program Klinik Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo, yang mana kekurangan tenaga kerja yang menangani program KUM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu hambatan utama. Yang kedua, yaitu permasalahan pada kurangnya dana/anggaran dari pemerintah sehingga klinik usaha mikro berjalan kurang optimal. Ketiga, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program tersebut sehingga masyarakat Kabupaten Sidoarjo banyak yang belum mengetahui tentang program klinik usaha mikro tersebut.

Penulis menganalisis implementasi Program Klinik Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Edward III. Indikator pertama yang menjadi perhatian adalah komunikasi, yang sangat diperlukan untuk menghubungkan dan mencapai kelompok sasaran yang dimaksud, yang berkaitan dengan cara informasi dalam kegiatan komunikasi disampaikan kepada publik. Sehingga, hal tersebut dapat berfungsi sebagai indikator dalam menilai kebijakan yang diterapkan berjalan dengan baik atau sebaliknya. Kedua, pemanfaatan sumber daya mencakup beberapa hal, seperti sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana yang ada untuk mendukung implementasi. Ketiga, disposisi dapat diartikan sebagai tekad para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Disposisi terlihat dari sikap pelaksana, yang merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Keempat, struktur birokrasi dianggap memiliki dampak yang cukup besar terhadap kebijakan yang diterapkan, yang terdiri dari dua komponen penting, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti "Implementasi Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) di Kabupaten Sidoarjo."

II. Metode

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, karena lokasi tersebut dianggap penting sebagai sumber literasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan data yang diperoleh dengan cara yang mendalam dan komprehensif [18]. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan objek penelitian, dan sesuai dengan definisinya, tujuan dari penelitian ini juga untuk menyajikan gambaran yang lebih rinci mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti. Fokus penelitian ini akan diukur berdasarkan teori implementasi menurut Edward III yang memiliki indikator : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi [19]. Pendekatan dalam penelitian ini mencakup wawancara langsung kepada informan untuk memperoleh keterangan, yang dilengkapi dengan observasi lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data yang mencakup data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti literatur jurnal dan media massa. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* [20]. Pada penelitian ini informan yang peneliti pilih antara lain: Kepala Bidang Program Klinik KUM Bapak Wildan, dan Sekertaris bidan KUM ibu Devi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Pada teknik analisis data oleh [21] yang meliputi: Pertama, teknik pengumpulan data mencakup metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Kedua, reduksi data adalah tahap seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan informasi dan mengubah data mentah menjadi bentuk

yang lebih ringkas serta mudah dipahami. Ketiga, penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi yang didapat dari lapangan secara terstruktur dan jelas, agar mudah dibaca dan mempermudah analisis secara keseluruhan. Keempat, penarikan kesimpulan merupakan tahap di mana peneliti mengintegrasikan semua data yang terkumpul di lapangan untuk membentuk pemahaman yang lebih komprehensif [21].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi serta usaha mikro. Tujuan program adalah memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro dan koperasi di wilayah tersebut, agar usaha dapat dikelola dengan cara yang lebih profesional, efisien, dan berkelanjutan. Klinik Koperasi dan Usaha Mikro dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan dalam aspek manajerial, keuangan, dan pemasaran produk, guna meningkatkan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan oleh koperasi serta usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo. Program Klinik KUM juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya perencanaan bisnis yang baik serta penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha. Harapan dari program ini adalah meningkatkan perekonomian lokal, membuka peluang pekerjaan baru, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Oleh karena itu, peneliti menganalisis keberhasilan program ini dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik menurut George Edward III, yang mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi implementasi program, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

A. Komunikasi

Komunikasi yang efektif terlihat dalam pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan rangkaian kegiatan yang diperlukan. Dengan begitu, setiap langkah persiapan dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara tepat untuk mencapai misi yang telah ditentukan. Komunikasi merupakan proses kompleks dan kontekstual yang melibatkan pertukaran pesan untuk memahami, berbagi, atau mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan [22]. Perannya sangat penting dalam memastikan tercapainya target implementasi, sehingga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan suatu program. Edward III mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik harus dilakukan secara efektif melalui sinergi antara penyelenggara kebijakan, perancang, dan pelaksana yang memiliki kepentingan yang saling terkait. Komunikasi sebagai suatu prosedur untuk pertukaran informasi yang berfungsi sebagai sumber daya untuk pemeliharaan, kemajuan, dan pengembangan organisasi yang fleksibel sesuai dengan tujuannya. Sedangkan organisasi adalah suatu kesatuan yang menjadi wadah dan wahana dalam visi untuk mencapai berbagai tujuan. Berikut informasi hasil wawancara bersama Customer Service Program Klinik KUM Bapak Wildan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo:

“Mengenai kehadiran program Klinik Usaha Mikro atau (KUM) pastinya kami sudah sering memberikan informasi melalui sosialisasi dan komunikasi diawal memang kita penyampaian lewat media sosial masih kurang jadi kita penyampaian melalui mulut ke mulut ke ukm akhirnya banyak binaan klinik yang masuk. Seiring berjalannya waktu akhirnya klinik yang dulunya punya banyak kegiatan dan memiliki kegiatan wajib yaitu sedekah ilmu akhirnya dibawah naungan bidang pemberdayaan serta membantu bidang pemberdayaan tersebut jadi kalau seumpama ada kegiatan yang membantu adalah klinik KUM ini. Untuk penyampaian saat ini kita sudah mulai aktif kembali di media sosial menggunakan instagram dinas koperasi dan saat itu juga semakin banyak binaan klinik yang masuk dan klinik sendiri ini sudah difungsikan sebagai customer service dan klinik digunakan sebagai layanan konseling bagi para binaan UKM untuk pelayanan atau tamu yang mau konseling masuknya di klinik dan membantu program pemberdayaan”. (Wawancara 20 Januari 2025).

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di ruang Klinik KUM Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usana Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

Pencapaian tujuan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi yang terjadi antara para pemangku kepentingan. Agar implementasi kebijakan berjalan dengan sukses, para pengambil keputusan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang langkah-langkah yang akan diambil. Pemahaman ini tercapai melalui komunikasi yang efektif dan transparan. Selain itu, kebijakan yang disampaikan harus terperinci, konsisten, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi yang efektif terjadi ketika semua pihak yang terlibat memahami dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab dalam mencapainya. Kebijakan dan peraturan yang dikomunikasikan harus jelas, akurat, dan konsisten agar program dapat berjalan sesuai dengan harapan. Kejelasan mengenai tujuan dan ukuran keberhasilan program ini perlu dikomunikasikan secara tepat kepada seluruh pelaksana, agar semua pihak yang terlibat mengetahui dengan pasti apa yang harus dicapai. Selain itu, konsistensi dalam penyampaian informasi juga penting agar tidak ada perbedaan interpretasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program. Pernyataan mengenai bentuk sosialisasi yang diberikan kepada para pelaku usaha di klinik di sampaikan oleh Customer Service Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Devi:

“Jadi, kita brandingnya memang di awal dari mulut ke mulut. Dari program-program yang sudah kita jalankan, kita sebar informasi melalui WhatsApp dan Facebook. Dari situ orang-orang mulai banyak yang tau, dari situ klinik semakin ramai dikunjungi. setelahnya, terbentuklah koordinator-koordinator dari masing-masing kecamatan, yang akhirnya jadi perwakilan dalam membentuk kelompok UMKM yang lebih terorganisir. Selain menggunakan media sosial, kita juga rutin mengadakan kegiatan sosialisasi bagi para pelaku UMKM yang sudah terdaftar di klinik. Salah satu kegiatan wajib yang sudah berjalan sejak tahun 2017 itu adalah Sosialisasi Sedekah Ilmu. Di kegiatan ini, para pelaku usaha mendapatkan berbagai materi terkait pengembangan usaha, strategi pemasaran, hingga manajemen keuangan. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk saling berbagi pengalaman dan memperluas jaringan bisnis”.

Hal ini sejalan dengan penelitian berjudul “Pelatihan Pemasaran Digital Bagi UMKM Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo” oleh Sulistyowati dkk. (2024), yang menunjukkan peningkatan pemahaman strategi digital marketing, penjualan online, dan visibilitas produk [23]. Perbedaannya, penelitian tersebut menekankan pelatihan formal yang terstruktur dan terukur, sedangkan penelitian ini mengedepankan strategi komunikasi adaptif melalui mulut ke mulut, pemanfaatan media sosial, serta kegiatan rutin seperti Sosialisasi Sedekah Ilmu yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat jaringan usaha dan akses layanan konsultasi bagi UMKM. Fenomena ini jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III, menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Klinik Koperasi dan Usaha Mikro sudah berjalan sesuai dan optimal melalui media sosial yang ada pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan para binaan pelaku UMKM yang sudah terdaftar pada klinik, serta klinik memiliki kegiatan yang wajib sejak tahun 2017 hingga sekarang yaitu kegiatan sosialisasi sedekah ilmu yang dimana sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, dimana klinik menyediakan layanan konsultasi bagi para pelaku binaan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo setiap orang dapat mengakses informasi tersebut serta memastikan informasi dan layanan yang diberikan dapat dipahami dengan baik serta menjangkau seluruh kalangan informasi serta sosialisasi yang diberikan kepada UMKM sangatlah jelas melalui platform-platform serta pamflet yang ada di media sosial klinik, serta klinik selalu berupaya meningkatkan komunikasi dan sosialisasi agar klinik KUM ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM yang asda di Kabupaten Sidoarjo menjadi UMKM yang maju. Variabel komunikasi sangat penting dalam implementasi kebijakan Program Klinik Koperasi Usaha Mikro.

B. Sumber Daya

Dimensi sumber daya dalam proses ini memegang peranan krusial sebagai elemen penting yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan agar dapat tepat sasaran dalam pemerintahan. Tanpa pengelolaan sumber daya yang baik, implementasi kebijakan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Edward III, sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan [19]. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, sementara dana dan perangkat pendukung lainnya berperan dalam memperlancar proses implementasi [24]. Oleh karena itu, perhatian terhadap sumber daya menjadi aspek penting dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan kebijakan. aktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tidak hanya terbatas pada informasi yang jelas dan konsisten. Salah satu elemen penting lainnya adalah keberadaan staf yang kompeten, yang memiliki kemampuan untuk mendukung implementasi kebijakan dengan efektif, selain itu ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kebijakan sehingga pelaksanaan program Klinik Usaha Mikro berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wildan selaku Customer Service Bidang Klinik KUM. Beliau menyatakan sebagai berikut:

"Untuk sumber daya manusia nya yang dimiliki di kliniknya sendiri dulu itu terstruktur, pada tahun 2017-2020 an ada 4 orang 2 orang dari provinsi yang ditugaskan di klinik dan 2 lagi admin terus kemudian seiring berjalannya waktu kita kekurangan untuk sumber daya di bidang-bidang lain akhirnya di sub bidang, yang dari provinsi hanya beberapa tahun, tapi untuk sekarang hanya ada 2 saja yang melayani program klinik KUM ini, tetapi sebagian ada juga yang di mutasi seperti bagian di dinas juga bisa melayani klinik KUM ini. Tetapi meskipun untuk saat ini klinik ini hanya mempunyai 2 sumber daya manusia tetapi kita tetap berusaha sebaik mungkin dalam melayani para pelaku usaha UMKM baru, baik di bidang konsultasi bisnis maupun layanan jenis apapun yang mencakup klinik dan bidang pembeedayaan, dan kita selalu berupaya agar Klinik Koperasi dan Usaha Mikro ini berjalan sampai seterusnya dan berjalan sesuai harapan kami karena Sidoarjo harus bisa menjadikota UKM yang maju dan sejahtera" (Wawancara 20 Januari 2025)..

Tabel 2. Struktur Organisasi Klinik Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Klinik Usaha Mikro		
No.	Nama	Jabatan
1.	Achmad Wildan	Customer Service (CS)
2.	Tutik Handayani	Tenaga Pendamping UM

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

Edward III menyatakan bahwa sumber daya berperan sebagai penggerak dan pelaku dalam setiap proses kebijakan. Salah satu elemen kunci dalam sumber daya adalah anggaran, yang menjadi faktor penentu dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sehingga tepat sasaran. Selanjutnya, pada aspek sumber daya anggaran, hal ini menjadi faktor yang sangat penting dalam implementasi program Klinik Koperasi Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo. Sumber daya anggaran ini merupakan hal paling utama agar klinik bisa berjalan dengan maksimal, tetapi untuk sumber daya anggaran yang ada pada Klinik Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan dengan baik yang hanya di danai oleh pemerintah di awal tahun dibentuknya klinik saja selebihnya merupakan dana jasa konsultasi saja. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan bapak Wildan selaku Customer Service pada Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu:

"Untuk anggaran dari pemerintah untuk kliniknya sendiri hanya ada beberapa anggaran saja dikarenakan Sidoarjo sempat ganti bupati juga pada waktu itu jadi untuk anggaran klinik sendiri sudah tidak ada anggaran lagi sejak tahun 2021 tetapi klinik tetap berjalan hanya saja klinik koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang diambil alih oleh bidang pemberdayaan yang terdapat pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, sehingga klinik dapat berjalan hingga saat ini dan klinik masih mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yaitu sedekah ilmu kepada para pelau usaha binaan klini kjadi untuk klinik ini sendiri kan kita juga menyediakan fasilitas pelatihan secara gratis salah satunya yaitu tadi program wajib kita yaitu sedekah ilmu, mengapa ada kegiatan sedekah ilmu karena kegiatan tersebut non anggaran dan mendatangkan pemateri tanpa anggran sama sekali, dan juga tanpa transport untuk snack atau makanan ringan biasanya didapat dari sponsor paling banyak dari bank delta arta. Jadi para ukm itu di undang di dinas koperasi mulai dari pelatihan-pelatihan usaha atau pelatihan kerajinan itu semua gratis tanpa pungutan biaya apapun ". (Wawancara 20 Januari 2025).

Tabel 3. Data Anggaran Klinik Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020-2021

NO	Tahun	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	2020	Pendampingan Klinik Usaha MIkro	Rp 50.000.000
2.	2021	Jasa Konsultasi	Rp 100.000.000

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan bahwa klinik mengalami permasalahan pada sumber daya manusia dan juga sumber daya anggaran, pemicu utama yang disebabkan yaitu pada sumber daya anggaran, apabila anggaran tidak ada maka sumber daya lain juga akan ikut berdampak pada berjalannya klinik dan dapat dibuktikan dari gambar dan tabel diatas yang menyertakan bahwa sumber daya manusia yang terdapat di klinik hanya terdapat 2 orang saja serta sumber daya anggaran yang dimiliki klinik hanya sampai tahun 2021 saja.

Hal ini sejalan dengan penelitian berjudul "*Analisis Dampak Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kinerja UMKM*" oleh Fajaruddin Pakpahan (2025), yang menemukan bahwa pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan, mentoring, dan perencanaan strategis secara signifikan meningkatkan produktivitas UMKM dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar [25]. Perbedaannya, penelitian tersebut

berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan perencanaan yang terstruktur, sedangkan penelitian ini menyoroti keterbatasan jumlah tenaga pendamping dan minimnya anggaran sejak 2021, yang mendorong penerapan strategi adaptif seperti memanfaatkan dana jasa konsultasi dan sponsor untuk mempertahankan kegiatan pembinaan UMKM, termasuk program rutin “Sosialisasi Sedekah Ilmu” yang berjalan tanpa dukungan anggaran formal. Dari fenomena diatas, jika dikaitkan dengan teori implementasi Edward III dalam hal sumber daya dapat dijelaskan bahwa implementasi program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dan sepenuhnya optimal. Dalam konteks ini program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro ini, masih terdapat kekurangan sumber daya, seperti keterbatasan jumlah tenaga pendamping yang memiliki kompetensi memadai untuk mengelola program serta kurangnya anggaran dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Menurut Edward III, sumber daya keuangan sangat penting dalam implementasi program atau kebijakan. pelaksanaan program ini tetap menghadapi tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia yang seharusnya dapat lebih ditingkatkan atau ditambah untuk sumber daya manusia yang ada pada program KUM ini. Jika anggaran dan sumber daya manusia yang terlibat lebih diperhatikan, diharapkan kinerja program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo dapat lebih maksimal dan membawa dampak yang lebih signifikan bagi pengembangan usaha mikro di daerah tersebut. Program tidak dapat berjalan secara efisien tanpa anggaran yang memadai. Apabila salah satu sumber daya, baik itu manusia maupun anggaran, tidak berfungsi dengan baik, maka kelangsungan program atau kebijakan akan terhambat, bahkan dapat menyebabkan tujuan yang diinginkan tidak tercapai.

C. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, sebagaimana karakter penyelenggara juga berperan besar dalam menentukan tindakan pelaksana dalam menerapkan kebijakan [26]. Edward III berpendapat bahwa untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, para pelaksana tidak hanya perlu memahami tugas yang harus dilaksanakan, tetapi juga harus memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakannya. Disposisi atau sikap pelaksana, seperti komitmen dan kejujuran, merupakan faktor krusial yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana, seperti komitmen dan kejujuran, menjadi faktor penting yang mendukung implementasi kebijakan yang sukses, dan sifat demokratis yang dimiliki oleh implementor juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan [27]. Oleh karena itu, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan harus didasari oleh semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dalam Program Klinik Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo Hal ini dikarenakan setiap pemangku kebijakan adalah individu yang hal ini terkait erat dengan kewenangan, pandangan pribadi, dan kepentingan individu yang berusaha untuk dicapai. Fenomena ini juga terlihat dalam penerapan program klinik koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, di mana komitmen serta kemampuan penyelenggara sangat menentukan kelancaran implementasinya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Devi selaku Customer Service pada Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

"Untuk sementara ini karena klinik hanya memiliki 2 sumber daya manusia hanya dipusatkan untuk layanan konseling jadi hanya mendapatkan tugas untuk pelayanan perizinan dan konsultasi saja kalau untuk pelatihan biasanya terdapat di bidang-bidang jadi semisal bidang ada pelatihan-pelatihan itu yang handle klinik koperasi usaha mikro kalau bidang pengembangan yang ngambil juga dari klinik, jadi klinik ini menjadi rumahnya para UKM jadi kegiatan apapun yang meemberi informasi yaitu klinik tetapi untuk sekarang memang layanan konsultasi itu tadi karenakan brandingnya dulu sidoarjo sebagai kota UKM. Secara umum, pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program klinik koperasi dan usaha mikro sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Serta pelatihan-pelatihan kepada para pegawai juga sering diadakan melalui seminar-seminar yang ada di klinik ini sendiri. Namun, kendalanya terletak pada pengelolaan administrasi yang masih kurang efisien, seperti lambatnya proses verifikasi data oleh petugas, karena ada kesulitan teknis dalam sistem yang digunakan." (Wawancara 04 Desember 2024).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun tupoksi telah dibagi sesuai dengan tugas masing-masing, kendala teknis dan administrasi di lapangan tetap mempengaruhi kelancaran implementasi. Seperti halnya dalam program Klinik KUM, dalam implementasi program klinik koperasi dan usaha mikro, masalah teknis seperti kesulitan operator dalam mengelola data atau ketidakmampuan beberapa petugas dalam mengoperasikan sistem digital menjadi hambatan dan lambatnya sistem pada pengurusan beberapa layanan yang ada pada klinik KUM ini. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan menjadi lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak waktu. Seperti yang disampaikan oleh pelanggan atau pelaku usaha binaan Klinik Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo:

"Untuk pelayanan petugas Klinik Koperasi dan Usaha Mikro sudah sangat baik, dan juga sudah sesuai dengan tugas masing-masing seperti ada di bagian customer service sudah melayani kami dengan baik dan ramah serta sesuai

dengan layanan yang kami ingin ajukan, dan kami tidak hanya 1 atau 2 kali diberikan layanan terbaik oleh petugas Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, tetapi setiap saat melakukan pelayanan baik pelayanan konsultasi bisnis atau usaha baru maupun layanan lainnya, kami mendapatkan banyak sekali wawasan yang diberikan kepada kami selaku binaan UMKM usaha baru dan juga kami mendapatkan banyak wawasan terkait jasa konsultasi bisnis yang disampaikan oleh customer service kepada kami, tetapi memang membutuhkan beberapa waktu untuk beberapa pelayanan seperti pelayanan peizinan yang tidak bisa langsung jadi beberapa hari kedepan yang memang sistemnya seperti itu”. (Wawancara 04 Desember 2024).

Hal ini sejalan dengan penelitian berjudul “Pengaruh Faktor Disposisi dalam Implementasi Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pengelolaan Dana Hibah Koperasi” oleh Della Aprilia dkk. (2023), yang menemukan bahwa disposisi seperti responsivitas dan proaktivitas aparat yang memegang peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan, dengan skor cukup baik pada sikap aparat tetapi menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan jumlah dan pelatihan pegawai agar respons terhadap pengurus koperasi dapat lebih optimal [28]. Berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa meskipun komitmen dan pembagian tugas di Klinik KUM sudah sesuai dengan tupoksi, ketidakefektifan muncul dari kendala teknis seperti lambatnya verifikasi administrasi dan terbatasnya penguasaan sistem digital. Kondisi ini menuntut adanya strategi koordinasi internal dan penguatan kemampuan operasional agar disposisi positif dari petugas dapat didukung oleh sistem yang andal dan efisien. Fenomena ini jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III, menunjukkan pada disposisi dalam implementasi Klinik Koperasi dan Usaha Mikro sudah berjalan sesuai. Teori implementasi menurut Edward III mengemukakan bahwa disposisi penyelenggara sangat mempengaruhi kesuksesan implementasi. Dalam hal ini, komitmen dari penyelenggara, seperti kepala dinas dan petugas yang terlibat, sangat penting. Untuk itu, apabila ada masalah teknis atau kelemahan dalam sistem, diperlukan adanya musyawarah bersama antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari solusi, serta memperkuat komitmen penyelenggara untuk menjalankan program dengan konsisten dan penuh tanggung jawab. Sebab, implementasi yang efektif memerlukan keselarasan antara pengetahuan tugas, komitmen tinggi, dan kemampuan operasional yang baik, agar program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

D. Struktur Birokrasi

Edward mengemukakan empat aspek yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dengan dua elemen utama yang meliputi mekanisme pelaksanaan atau SOP dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Dalam konteks program Klinik Koperasi Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo, hal ini juga mencakup koordinasi yang tepat antar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut. Dari hasil wawancara dengan Ketua program Klinik Koperasi Usaha Mikro, Bapak Wildan, beliau menjelaskan seperti berikut:

“Prosedur operasional standar telah disusun dengan baik, sehingga setiap pelaku usaha mikro dapat mengakses layanan dengan cara yang mudah dan tidak rumit. Sehingga informasi dapat dilaksanakan dengan cara yang tidak berbelit-belit. Selain itu, pembagian tugas antara tim yang terlibat dalam program ini juga sudah sangat jelas, dan setiap orang memiliki pemahaman yang baik serta komitmen untuk menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. “ (Wawancara 04 Desember 2024).

Tabel 4. Standart Operasional Prosedur Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Urutan	SOP Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo
Pertama	Pemohon mendatangi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, diantaranya: KTP (wilayah Sidoarjo), Foto produk (apabila telah memiliki usaha).
Kedua	Pemohon terlebih dahulu mengisi buku tamu, kemudian diarahkan ke ruang klinik konsultasi Usaha Mikro untuk menyerahkan persyaratan yang dibawa.
Ketiga	Pemohon mengisi form yang telah disediakan (waktu yang dibutuhkan selama 1 jam dan tidak dipungut biaya, GRATIS)
Keempat	Pemohon akan menerima pemberitahuan melalui WhatsApp apabila kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

Sumber: Diolah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (2025)

Jika dikaitkan dengan teori Edward III, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa implementasinya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Sebagai panduan dalam menjalankan tugas sesuai fungsinya, SOP juga berfungsi untuk menilai kinerja suatu instansi atau organisasi berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural yang berlaku [29]. Hal ini terbukti dengan adanya prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit dalam proses pelayanan kepada para pelaku koperasi dan usaha mikro. Menurut teori Edward III, Kerangka kerja yang jelas dan sistematis adalah salah satu unsur penting dalam SOP yang baik, yang menjadi acuan bagi setiap pihak dalam pelaksanaan program. SOP yang diterapkan pada program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi standar tersebut, sehingga para pelaksana program dapat bekerja dengan acuan yang jelas.

Hal ini sejalan dengan penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung” oleh Nurhadi dkk. (2024), yang menemukan bahwa struktur birokrasi yang tidak konsisten dengan perubahan prosedur yang sering tanpa koordinasi yang memadai menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan pemerintah, meskipun SOP telah disusun [30]. Perbedaannya, dalam penelitian Anda, Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan SOP yang jelas dan pembagian tugas yang terstruktur sehingga prosedur pelayanan berjalan sederhana dan efisien. Namun meskipun struktur birokrasi berfungsi baik, keunggulan tersebut perlu dipertahankan dengan terus memperkuat koordinasi agar sistem yang sudah jelas tetap responsif dan adaptif terhadap kebutuhan UMKM. Fenomena ini jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III, menunjukkan bahwa implementasi Klinik Koperasi dan Usaha Mikro sudah berjalan sesuai dan optimal, struktur organisasi dalam program ini juga sudah menempatkan posisi yang tepat dan job *description* yang jelas bagi masing-masing pihak yang terlibat. Penempatan ini sangat penting, karena menurut teori Edward III, jika struktur organisasi tidak sesuai, maka akan terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dengan adanya penempatan yang tepat dan sistematis, implementasi program Klinik Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi yang diharapkan.

IV.SIMPULAN

Dari adanya pembahasan dan uraian diatas mengenai Implementasi Program Klinik Koperasi Usaha MIKRO (KUM) di Kabupaten Sidoarjo maka dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam aspek komunikasi, Klinik Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi melalui media sosial yang tersedia. Informasi serta layanan yang ada di klinik dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Selain itu, telah dibentuk koordinator di setiap kecamatan yang berperan dalam pembentukan kelompok-kelompok UMKM. Klinik juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bagi pelaku UMKM yang telah terdaftar serta menyediakan layanan konsultasi. Salah satu kegiatan rutin yang telah berlangsung sejak tahun 2017 adalah sosialisasi "Sedekah Ilmu," yang bertujuan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM. Kedua, dalam aspek sumber daya, terdapat dua komponen utama, yaitu sumber daya manusia dan anggaran. Klinik KUM hanya memiliki dua tenaga kerja, yang menjadi tantangan dalam menjalankan program secara optimal. Dari sisi anggaran, pendanaan untuk program ini hanya tersedia hingga tahun 2021, sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan klinik. Ketiga, dari aspek disposisi, meskipun tugas dan fungsi telah dibagi sesuai peran masing-masing, masih terdapat kendala teknis dan administratif di lapangan. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain kesulitan operator dalam mengelola data, keterbatasan keterampilan dalam mengoperasikan sistem digital, serta lambatnya sistem dalam pengurusan beberapa layanan di klinik. Hal ini berdampak pada proses pelayanan yang menjadi lebih lambat dan membutuhkan waktu lebih lama. Keempat pada aspek struktur birokrasi, program Klinik KUM telah disusun dengan sistem yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga prosedur layanan sudah berjalan efisien. Implementasi struktur birokrasi dalam program ini mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian mengenai “Implementasi Program Klinik Usaha Mikro (KUM) Di Kabupatn Sidoarjo”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kepada kedua orangtua serta keluarga, dosen pembimbing dan seluruh narasumber di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Penulis juga berterimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] E. Sartika and A. Suryani, "Pengaruh Umkm Terhadap Pendapatan Nasional Berdasarkan Kelompok Usaha Tahun 2014-2018," *J. Sainika Unpam J. Sains dan Mat. Unpam*, vol. 3, no. 2, p. 122, 2021, doi: 10.32493/jsmu.v3i2.7414.
- [2] K. W. A. Damayanti, "Evaluasi Penerapan Layanan Klinik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung," *Repos. Politek. Negeri Bali*, 2022.
- [3] L. B. Putong and K. E. Wahyudi, "Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai Pada Umkm," *J. Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 4, p. 338, 2022, doi: 10.31258/jkp.v13i4.8158.
- [4] L. M. Hamzah and D. Agustien, "Pengaruh Perkenbangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Pendapatan Nasional pada Sektor UMKM," *J. Ekon. Pembang.*, vol. 8, no. 2, pp. 215–228, 2019.
- [5] D. Rahmawati and E. Nawangsari, "Pemberdayaan Masyarakat Pada UMKM Kampung Kue," *J. Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 4, 2023.
- [6] I. W. K. Suwastika, M. S. Kase, N. Bayti, and D. Wangania, *Kewirausahaan di Era Digital: Berinovasi dan Bertumbuh dalam Dunia Teknologi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- [7] P. F. Drucker, *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. New York: Perennial Library, 1986.
- [8] A. Manap, *Manajemen Kewirausahaan Era Digitalisasi*. Jaakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2021.
- [9] S. Vinatra, A. Bisnis, U. Veteran, and J. Timur, "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat," *J. Akuntan Publik*, vol. 1, no. 3, pp. 1–08, 2023, doi: 10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832.
- [10] P. Delfyrah, K. O. Zakin, M. A. Zibran, M. H. Fikri, and M. Sannia, "Analisis Perlindungan Hukum bagi UMKM : Pembebasan Hak Guna Pelaku UMKM dengan Membebaskan Regulasi Perdagangan," no. 2, pp. 1–7, 2024.
- [11] B. Ananda Kurniawan, "Upaya Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Dalam Membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Era Modern," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, pp. 1696–1704, 2024.
- [12] N. Nada Hidayah and H. Sukmana, "Analysis of Corporate Strategy in The Development of Micro, Small, and Enterprises (MSMEs)," *Indones. J. Public Policy Rev.*, vol. 17, pp. 1–11, 2022, doi: 10.21070/ijppr.v17i0.1249.
- [13] F. A. Muhammad Fadhil Ridho, "Pengembangan Usaha UMKM Melalui Optimalisasi Penggunaan dan Pengelolaan Digital Pasca Pandemi Covid-19," pp. 1–7, 2022, [Online]. Available: <https://himie.umy.ac.id>
- [14] D. Damayanti, "Strategi branding klinik Koperasi dan Usaha Mikro (KUM) melalui kelompok arisan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo," *Repos. Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- [15] M. E. L. Astono, M. Ogotan, and B. Kiyai, "Implementasi Kebijakan Pemerdayaan Usaha Kecil Masyarakat di Kecamatan Tuminting Kota Manado," *Anal. pendapatan dan tingkat Kesejaht. rumah tangga petani*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [16] F. Fahrezi, M. Rifai, and G. Argenti, "Implementasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Program Pelatihan dan Bantuan Alat," *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 2, pp. 4008–4012, 2022.
- [17] A. AS, "Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Maros," *Repos. Univ. Muhammadiyah Makasar*, 2019.
- [18] Bogdan and Biklen, *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press, 2016.
- [19] E. G. Mazey III, *Public Policy Implementing*. London - England: Jai Press Inc, 1984.
- [20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [21] M. B. Miles and A. M. Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- [22] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behavior*, 18th, Glob ed. London: Pearson Education, 2021.
- [23] R. Sulistyowati *et al.*, "Pelatihan Pemasaran Digital Bagi UMKM Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo," *J. KARINOV*, vol. 7, no. 1, p. 15, 2024, doi: 10.17977/um045v7i1p015.
- [24] B. Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- [25] Fajaruddin Pakpahan, "Analisis Dampak Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Kinerja UMKM," *J. Ilmu Manajemen, Ekon. dan Kewirausahaan*, vol. 5, no. 2, pp. 655–669, 2025, doi: 10.55606/jimek.v5i2.6449.
- [26] S. A. Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- [27] I. Igirisa, *KEBIJAKAN PUBLIK: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.
- [28] D. Aprilia, Denny Hernawan, and Neng Virly Apriliani, "Pengaruh Faktor Disposisi Dalam Implementasi

- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Pengelolaan Dana Hibah Koperasi,” *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 5, pp. 1829–1837, 2023, doi: 10.30997/karimahtauhid.v2i5.10083.
- [29] Moekjjat, *Administrasi perkantoran*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- [30] N. Nurhadi, I. Kania, and M. Mulyaningsih, “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung,” *Minist. J. Birokrasi dan Pemerintah. Drh.*, vol. 7, no. 1, pp. 80–100, 2025, doi: 10.15575/jbpd.v7i1.44413.